



Buletin Parlementaria



3 Ajak Jepang
Perkuat
Kerja Sama
dengan RI



4 Tingkatkan
Produksi
Kapal
Pertahanan



Regulasi yang Memihak Susu Sapi Lokal

Nomor 1322/III/XII/2024 Desember 2024



9 772614 339005



Regulasi yang Memihak Susu Sapi Lokal



FOTO: MUNICHEN/AHA

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, bersama tim saat kunjungan kerja spesifik ke Koperasi Peternak Sapi Perah Bandung Utara (KPSBU), Lembang, Bandung Barat.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, memimpin kunjungan kerja spesifik (Kunsfik) Komisi IV DPR RI dengan sejumlah mitra kerja dan para peternak susu sapi di Koperasi Peternak Sapi Perah Bandung Utara (KPSBU), Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat.

Disapa akrab dengan sebutan Titiek, ia menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI meminta pemerintah segera membuat regulasi untuk mendukung penyerapan susu sapi dari peternak lokal. Regulasi tersebut dinilai penting untuk mengatasi rendahnya harga jual dan persaingan dengan susu impor, sekaligus mendukung program nasional “Makan Siang dan Susu Gratis”.

“Kami mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang berpihak pada peternak lokal, supaya mereka bisa bekerja lebih baik. Tentunya bisa berkembang dan lebih sejahtera lagi,” ujar Titiek di KPSBU Lembang, Jawa Barat, pada Kamis (21/11).

Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi peternak lokal adalah rendahnya daya serap susu sapi oleh industri pengolah susu di dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas industri serta kualitas susu lokal yang dianggap belum memenuhi standar.

“Perusahaan industri pengolah susu tidak bisa menyerap sebagian susu sapi dari para peternak lokal atau dalam negeri, karena industri itu sendiri mungkin kapasitasnya terbatas.

Kemudian, kualitas susu sapi kurang memenuhi standar,” jelas Politisi Fraksi P-Gerindra ini.

Titiek juga menyoroti ketiadaan regulasi yang mewajibkan perusahaan-perusahaan pengolah susu untuk menyerap susu dari peternak lokal. Ia menilai, tanpa aturan yang jelas, perusahaan lebih memilih mengandalkan impor dibandingkan membeli susu lokal.

“Ke depan, kami di Komisi IV akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi-regulasi yang berpihak kepada masyarakat. Misalnya, perusahaan tidak bisa impor 100%. Mereka harus ada peraturan tertentu, bahwa mereka tetap harus menyerap susu dari peternak lokal,” tutup legislator Dapil Yogyakarta ini.

mun/aha



Ajak Jepang Perkuat Kerja Sama dengan RI



FOTO: ENO/AHA

Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri resepsi diplomatik dalam rangka peringatan HUT ke-79 RI dan 66 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jepang yang diselenggarakan oleh KBRI Tokyo. Dalam kesempatan tersebut, Puan mengajak Jepang untuk terus memperkuat kerja sama di berbagai sektor, termasuk hubungan antarmasyarakat kedua negara.

Resepsi diplomatik yang digelar di Sheraton Miyako Hotel, Tokyo, itu turut dihadiri Ketua Parlemen Jepang Nukaga Fukushima, Menteri Luar Negeri Jepang Miyajiri Takuma, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, serta sejumlah tokoh penting dari Jepang. "Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menghadiri acara ini dalam rangka

merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79," ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/11).

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Kimigayo, diiringi musik dari Angklung Saung Udjo. Puan menyebut, tahun 2024 menjadi tahun pertama implementasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Jepang yang ditingkatkan pada tahun lalu.

"Kemitraan strategis komprehensif ini menjadi momentum bagi Indonesia dan Jepang untuk membawa kerja sama yang sudah ada ke tingkat lebih tinggi di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya," kata Puan.

ums/aha



Biro Pemberitaan Parlemen



- PENGAWAS UMUM**
Pimpinan DPR RI
- KETUA PENGARAH**
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
- WAKIL PENGARAH**
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)
- PIMPINAN PELAKSANA**
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**
M. Ibrurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)
- WAKIL PIMPINAN REDAKSI**
Rizka Arinindyia, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)
- REDAKTUR**
Agung Hidayat, S.I.P. Ridwan Budiman, S.I.P. Muhammad Husen
- REDAKTUR FOTO**
M. Andri Nurdiansyah
- SEKRETARIS REDAKSI**
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md.
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds
- ANGGOTA REDAKSI**
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nachren Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Baggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitampul, Zulfiakar Mubien, Yasmin Nabila
- FOTOGRAFER**
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri
- INFOGRAFIS**
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri
- ADMINISTRASI**
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto
- PENERBITAN**
- PIMPINAN PENERBITAN**
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)
- PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)
- DESAIN GRAFIS**
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom
- IT MEDIA DIGITAL**
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E. Indah Ekawati, S.I.Kom.
- PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)
- KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Zulfiakar, S.A.B.
- ADMINISTRASI**
- STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa
- Telp. 021-571 5697
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





FOTO: UBD/PDT

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke PT Lundin di Banyuwangi.

Tingkatkan Produksi Kapal Pertahanan

Komisi I DPR RI menyoroti potensi pengembangan industri pertahanan dalam negeri melalui PT Lundin Industry Invest. Perusahaan ini dikenal sebagai produsen perangkat sistem senjata (alutsista), khususnya di bidang kapal komposit atau boats.

“Negara kita ini luas, terdiri dari kepulauan. Strateginya, kita bisa gunakan tank boat di setiap sudut. Kapalnya kecil, tapi mampu meluncurkan misil dengan jangkauan jauh, seperti dari Banyuwangi hingga Surabaya. Dan itu dikembangkan di PT Lundin ini,” ungkap Anton Sukartono Suratto, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke PT Lundin di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (21/11).

Kapal-kapal produksi PT Lundin dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat perlindungan wilayah Indonesia. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kapasitas produksi yang masih terbatas, yaitu hanya enam unit per tahun. Untuk memenuhi target kebutuhan 33 kapal, diperlukan pengembangan fasilitas produksi.

“Saat ini, PT Lundin memiliki lahan seluas 8,8 hektare, namun baru menggunakan sepertiganya. Jika seluruh lahan dimanfaatkan, kapasitas produksi dapat meningkat menjadi 12 kapal per tahun. Tapi, kita harus memastikan kualitas dan performa kapal ini terlebih dahulu dengan menguji prototipe yang sudah ada,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Dalam rapat mendatang bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Komisi I berencana membawa hasil kunjungan ini untuk mendorong percepatan produksi kapal. Berdasarkan pesanan Kemenhan, PT Lundin mendapatkan tugas memproduksi 33 dari total 100 kapal yang dibutuhkan. **uf/aha**



NEGARA KITA INI LUAS, TERDIRI DARI KEPULAUAN. STRATEGINYA, KITA BISA GUNAKAN TANK BOAT DI SETIAP SUDUT.

**Anton Sukartono
Suratto**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Siap Kawal Peluang Indonesia Gabung BRICS

Komisi I DPR RI akan selalu siap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar kepentingan nasional Indonesia dapat dicapai melalui upaya-upaya diplomasi ekonomi, termasuk pertimbangan peluang Indonesia bergabung dalam BRICS.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto dalam diskusi bertema Menakar Untung Rugi Rencana Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS yang digelar di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

“Selain itu, selaku pimpinan Komisi I DPR RI yang menaungi urusan luar negeri, kami juga bertanggung jawab untuk terus memberikan masukan yang konstruktif terhadap pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, ungkap Anton, Fraksi Partai Demokrat DPR RI memandang bahwa keterlibatan publik, seperti pakar, akademisi, dan kaum intelektual sangat penting dalam rangka memberikan ruang publik dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

Selain itu, tandas Anton, anak muda dan mahasiswa yang menggandrungi politik global juga perlu diberikan tempat agar mereka mengerti bahwa ada banyak pertimbangan yang perlu dilakukan dalam langkah pemerintah di kancah politik internasional.

“Kita perlu meneladani sepak terjang Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam membawa Indonesia mengarungi ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2008. Pada saat itu Indonesia berhasil



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto saat membuka diskusi bertema Menakar Untung Rugi Rencana Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS di Ruang Abdul Muis.

melewati masa sulit dan bahkan mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tuturnya.

Oleh karena itu, Anton berharap pemerintahan selanjutnya perlu memperhatikan peluang serta tantangan yang harus diantisipasi

pemerintah Indonesia dalam proses bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS. Indonesia, tegasnya, harus mampu mengoptimalkan organisasi tersebut untuk memenuhi kepentingan nasional dalam bidang ekonomi.

pun/rdn



Bahas Netralitas ASN dan Kerawanan Pilkada Serentak 2024

Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Dengar Pendapat lanjutan untuk membahas kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di empat provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam

menyukseskan Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024. Menurutnya, agenda ini menjadi wujud komitmen DPR RI bersama pemerintah pusat untuk memastikan Pilkada berlangsung lancar, aman, dan kredibel.

"Kami berharap pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu, laporan objektif terkait dinamika di daerah masing-masing sangat diperlukan, khususnya pada tahapan krusial seperti penghitungan suara dan

penetapan hasil," ujar Rifqinizamy saat membuka rapat.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN). Rifqinizamy menegaskan bahwa ASN harus bersikap netral sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Penguatan regulasi ini dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilu dan Pilkada, serta sejumlah Surat Edaran Menteri PANRB.

"Profesionalitas dan netralitas ASN, terutama yang menjabat sebagai pejabat kepala daerah, sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai prinsip demokrasi," tegas Rifqinizamy.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, memaparkan hasil pemetaan tingkat kerawanan pelanggaran Pilkada di berbagai daerah berdasarkan 24 indikator. Dari data Kemendagri, terdapat 90 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, yang meliputi 5 provinsi, 73 kabupaten, dan 12 kota.

ums/aha



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dalam foto bersama usai memimpin Rapat Dengar Pendapat lanjutan untuk membahas kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Gedung Nusantara.

Inovasi Ramah Gen Z & Milenial untuk Pemilih Pemula



FOTO:INDN/PDT

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (13/11/2024).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong inovasi yang dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada serentak 2024. Pemilih pemula pada Pilkada 2024 kali ini sebagian besar merupakan generasi Z.

Lebih lanjut, legislator dari PDI-Perjuangan itu mendorong KPUD di seluruh daerah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dia menyampaikan bahwa banyak anak muda dari generasi Z yang tertarik dengan politik untuk aktualisasi diri.

“Pemilih pemula dari generasi Z dan milenial ini mencapai hampir 53 persen. Kesadaran mereka untuk memilih tentu berbeda dengan generasi saya,” ujarnya setelah Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (13/11).

Seperti diketahui, generasi Z dan milenial hidup di era teknologi yang sangat berkembang, dengan berbagai jenis media sosial yang muncul di zaman ini. Kemajuan teknologi ini memungkinkan mereka mengakses informasi dengan mudah.

Oleh karena itu, Aria Bima

mendukung penciptaan inovasi yang dapat menarik minat pemilih pemula. Penyelenggara pemilu, menurutnya, dapat mengeksplorasi ruang-ruang aktif yang dimiliki generasi Z dan milenial, seperti media sosial.

“Maka, cara untuk mendorong minat pilih mereka tentu berbeda. Misalnya, kita bisa mengadakan festival atau panggung hiburan sambil mengajak mereka untuk mencoblos. Bisa juga dengan membuat gerakan ‘pamer foto’ saat di TPS, menunjukkan jari yang sudah berlumur tinta sebagai bukti sudah mencoblos,” kata dia.

 **ndn/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Prioritaskan Pengungkapan Kasus yang Substantif



FOTO: DEP/PDT

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat memimpin Rapat Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029, di Gedung Nusantara II.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memprioritaskan pengungkapan kasus-kasus besar. Khususnya yang mempunyai makna substantif terkait pemberantasan korupsi, ketimbang terjebak pada persoalan remeh temeh.

“Begitu juga ekspektasi kami terhadap Dewas (Dewan Pengawas) KPK ini. Kami nggak terjebak pada hal gimik-gimik Pak,” kata Habib dalam sesi pendalaman dengan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK Benny Jozua Mamoto di Rapat

Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun meminta Cadewas KPK untuk menyelesaikan secara internal hal-hal yang kurang substantif terkait dengan pemberantasan korupsi. Selain itu, Habib juga meminta Dewas KPK tidak hanya banyak berbicara namun bertindak nyata. Ia menyebut, misalnya pada periode lalu dimana pimpinan dan dewas KPK seolah berbalas pantun di media, dengan perang *statement*.

“Seperti saling sindir, saling perang *statement*. Kenapa nggak masing-masing jalankan saja implementasikan sikapnya melalui kebijakan-kebijakan di institusi masing-masing, kalau mau panggil, tinggal panggil gitu,” pungkasnya.

Melihat posisi KPK sebagai bagian dari penegakan hukum, Habib pun menyarankan pimpinan KPK maupun dewas KPK agar tidak dengan mudah mengeluarkan *statement*. Menurutnya, lebih baik KPK memiliki juru bicara yang hanya berbicara pada konferensi pers resmi, agar *statement* yang keluar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat.  **bia/rdn**



Persoalan Moral & Etik Buat Indeks Persepsi Korupsi Turun



FOTO: DEP/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rofiqi.

ujarnya dalam Rapat Konsultasi dan Pendalaman Cadewas KPK di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11)

Maka dari itu, dalam kesempatan itu, ia mempertanyakan langkah yang dilakukan Cadewas KPK untuk menangani hal itu. Rofiqi dalam kesempatan itu menyoroti hal lainnya, yakni upaya apa yang akan dilakukan Cadewas untuk menghadapi resistensi internal terhadap pengawasan yang dianggap berlebihan. Hal itu ditanyakan sebab, cadewas menyinggung hal itu dalam paparannya. Ia berharap, hubungan Dewas dengan KPK bisa kembali dekat.

“Nah kita tahu Pak Dewas dan pimpinan KPK ini kayak *Tom and Jerry*, berantem terus *nggak* ada akurunya. Bagaimana strategi bapak agar nanti misalkan menjadi dewas KPK itu bukan menjadi *Tom and Jerry* lagi, bisa menjadi *Romeo dan Juliet*,” tutupnya. — hal/rdn

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rofiqi mempertanyakan beberapa persoalan pada calon dewan pengawas (Cadewas) KPK. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa KPK sedang berada di titik nadir yang paling rendah. Pasalnya, indeks persepsi korupsi Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang terus mengalami penurunan.

“Nah salah satu yang menyebabkan (turunnya Indeks Persepsi Korupsi) itu menurut saya moral dan etik yang hilang dari KPK. Tentu juga kita tahu bahwa pimpinan KPK sekarang itu banyak melakukan *abuse of power*,”



SALAH SATU YANG MENYEBABKAN (TURUNNYA INDEKS PERSEPSI KORUPSI) ITU MENURUT SAYA MORAL DAN ETIK YANG HILANG DARI KPK. TENTU JUGA KITA TAHU BAHWA PIMPINAN KPK SEKARANG ITU BANYAK MELAKUKAN ABUSE OF POWER

Muhammad Rofiqi

Anggota Komisi III DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Utamakan Peternak Lokal, Bukan Impor Susu



FOTO: ARI/ PDT

Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Gedung Nusantara.

Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu mengimpor sapi susu perah jika pemerintah serius memberdayakan peternak lokal. Menurutnya, langkah prioritas pemerintah seharusnya diarahkan pada pengelolaan produksi nasional dengan lebih baik, bukan malah bergantung pada produk impor.

“Pemerintah sebenarnya cukup memberdayakan peternak lokal. Contohnya di Boyolali, minggu lalu puluhan ribu ton susu, sekitar 50 ribu ton, terbuang sia-sia karena tidak ada pengaturan penyerapan produksi nasional yang memadai,” ujar Sidot di

sela agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

Dirinya menyoroti bahwa ketergantungan terhadap impor sering kali disebabkan oleh anggapan bahwa harga produk impor lebih murah dibandingkan produksi dalam negeri. Namun, ia menilai argumen ini tidak sepenuhnya tepat dan justru merugikan peternak lokal.

“Kalau pemerintah berpihak kepada rakyat, seharusnya jangan hanya bicara soal harga. Disinilah peran subsidi pemerintah untuk menekan harga produksi dalam negeri. Jadi ketika masyarakat membeli, harganya

tetap terjangkau,” jelasnya.

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mengungkapkan adanya indikasi mafia pangan dan manipulasi data yang turut mempengaruhi kebijakan impor. Ia menilai regulasi yang lebih tegas diperlukan agar peternak lokal mendapat perlindungan dan tidak kalah bersaing dengan produk impor.

Terakhir, ia mengingatkan pentingnya pemerintah untuk fokus pada kesejahteraan petani dan peternak dengan mengatur harga faktor produksi, seperti pupuk dan pakan ternak. Langkah ini, sebutnya, diharapkan dapat membuat produk lokal bersaing secara sehat dengan produk impor. **ums/mj**



Masalah Akses Air di Bendungan Jatigede

Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maizat, menyoroti berbagai permasalahan yang dialami masyarakat sekitar Bendungan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, terutama terkait akses air bersih dan infrastruktur jalan. Hal tersebut disampaikan Syahrul usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bendungan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (13/11).

“Ada fakta yang mengejutkan, di mana masyarakat yang tinggal di sekitar bendungan justru kesulitan mendapatkan air bersih. Kok bisa

masyarakat yang menyerahkan tanahnya untuk pembangunan bendungan, malah kesulitan air?” ujarnya.

Syahrul menilai masalah ini timbul karena kurangnya koordinasi antara Direktorat Jenderal (Dirjen) yang terlibat dalam pembangunan bendungan dan penyediaan air. Ia menjelaskan bahwa Bendungan Jatigede dibangun oleh Dirjen Sumber Daya Air, sementara penyediaan air bersih menjadi tanggung jawab Dirjen Cipta Karya.

Selain masalah air, Syahrul juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi masyarakat terdampak, terutama

mereka yang lahannya telah dikonversi untuk pembangunan bendungan. Banyak warga yang sebelumnya berprofesi sebagai petani kini beralih menjadi pengelola pariwisata di sekitar bendungan.

“Mereka mengharapkan adanya pelatihan untuk mengembangkan UMKM dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola destinasi wisata lokal. Ini harus menjadi catatan bagi kementerian terkait lainnya,” ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut.

Mengenai akses jalan, Syahrul menyayangkan kondisi jalan di sekitar bendungan yang belum optimal, padahal Bendungan Jatigede merupakan proyek strategis nasional. Ia merekomendasikan agar pemerintah pusat, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, mendukung pembangunan jalan di sekitar bendungan tanpa membebani anggaran pemerintah daerah.

— eki/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maizat, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bendungan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (13/11/2024).

FOTO: EKI/PDI

Perjuangkan Warga Terdampak Jalan Tol Bocimi



FOTO: LCA/PDT

Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, saat mengikuti Rapat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di ruas tol Bocimi, Rabu (13/11/2024).

Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mempertanyakan proses penanganan dan ganti rugi bagi rumah warga yang terdampak pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Ia menegaskan adanya sejumlah rumah warga yang mengalami keretakan akibat kegiatan konstruksi awal, seperti saat pemasangan tiang pancang.

“Apakah sudah selesai proses ganti rugi untuk rumah warga yang rusak dan retak-retak? Pada tahap awal pembangunan tol ini, banyak

rumah yang retak akibat alat berat dan aktivitas pemasangan tiang pancang.



ADA SEKITAR 150 RUMAH TERDAMPAK DENGAN KONDISI RETAK-RETAK. KALIAN (PENYELENGGARA) DATANG, LALU MENYEMEN ULANG. TAPI SAAT RUMAH KEMBALI RETAK ATAU ROBOH, KALIAN MENYALAHKAN KONDISI TANAH JAWA BARAT YANG LABIL. MENYALAHKAN ALAM, YANG JELAS TIDAK BISA MEMBAWA PENGACARA. JADI, ALAM SELALU DIJADIKAN KAMBING HITAM

Adian Napitupulu

Anggota Komisi V DPR RI

Setahu saya, hingga kini masih belum ada penyelesaian,” ujarnya dalam Rapat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di ruas tol Bocimi, Rabu (13/11).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengungkapkan bahwa meski telah ada upaya penanganan, solusi yang diberikan belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. Adian menuntut agar penyelenggara dan pelaksana proyek tidak menggunakan alasan kondisi alam untuk menghindari tanggung jawab ganti rugi.

“Ada sekitar 150 rumah terdampak dengan kondisi retak-retak. Kalian (penyelenggara) datang, lalu menyemen ulang. Tapi saat rumah kembali retak atau roboh, kalian menyalahkan kondisi tanah Jawa Barat yang labil. Menyalahkan alam, yang jelas tidak bisa membawa pengacara. Jadi, alam selalu dijadikan kambing hitam,” sindir Adian.

Merasa tidak puas dengan respons penyelenggara tol, Adian menyatakan akan mencari sendiri warga yang terdampak dan memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan kompensasi yang layak.

uc/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



BMTH Diharapkan Serap Tenaga Kerja Lokal



FOTO: TRA/PDT

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, beserta tim saat kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Project Gallery BMTH di Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali, Kamis (14/11/2024).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mendorong PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo untuk memaksimalkan pelibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Proyek strategis ini diproyeksikan menyerap jumlah tenaga kerja yang signifikan, seiring dengan meningkatnya jumlah kapal pesiar yang akan berlabuh di BMTH.

“Ini ada peningkatan karyawan yang signifikan, kurang lebih akan ada 1.000 karyawan yang bekerja di BMTH nantinya. Maka pemerataan bagi masyarakat, khususnya keterlibatan masyarakat Bali, menjadi penting. Masyarakat

Bali tidak boleh terpinggirkan, tidak boleh menjadi tamu di negerinya

sendiri, tapi harus menjadi tuan di negerinya sendiri,” ungkap Nurdin dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke *Project Gallery* BMTH di Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali, Kamis (14/11).

Selain menyerap tenaga kerja lokal, Nurdin juga mendorong Pelindo untuk meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Ia berharap UMKM di kawasan BMTH dapat tergabung dalam koperasi sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM.

“Kami sarankan membentuk koperasi. Namun, dengan catatan bahwa Pelindo harus memberikan pekerjaan yang bisa dilaksanakan oleh UMKM. Tugas-tugas tersebut kemudian dapat diserahkan kepada koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan Pelindo dan melibatkan masyarakat sekitar,” tandasnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menilai pembangunan BMTH sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan Pelindo merupakan sebuah lonjakan kinerja yang sangat baik, baik dari aspek peningkatan laba bersih perusahaan, omzet, maupun pelayanan.

tra/aha



TUGAS-TUGAS TERSEBUT KEMUDIAN DAPAT DISERAHKAN KEPADA KOPERASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PELINDO DAN MELIBATKAN MASYARAKAT SEKITAR

Nurdin Halid

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Optimalisasi Hubungan Indonesia-Peru



FOTO: GER/PDT

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, usai Kunjungan Kehormatan (Courtesy Call) Duta Besar Peru untuk Indonesia, Luis Raúl Tsuboyama Galván, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menyatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan Peru memiliki potensi besar, khususnya di sektor teknologi digital dan pariwisata. Menurutnya, potensi ini membuka peluang untuk memperluas kerja sama, baik dalam bentuk investasi maupun pertukaran teknologi.

Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin agenda Kunjungan Kehormatan (Courtesy Call) Duta Besar Peru untuk Indonesia, Luis Raúl Tsuboyama Galván, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa

(19/11). Dalam pertemuan tersebut, ia menyoroti pentingnya perlindungan keamanan siber sebagai salah satu fokus utama di sektor teknologi digital.

“Kita tahu bahwa proteksi siber di Indonesia masih memerlukan banyak peningkatan. Ini menjadi kesempatan untuk melihat teknologi yang dimiliki Peru atau negara lain, karena kita membutuhkan solusi konkret dalam menghadapi ancaman seperti peretasan,” ujar Anggia kepada **Parlementaria**.

Selain sektor digital, sektor pariwisata juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan laporan Kedutaan Besar Peru untuk Indonesia, Peru

menawarkan peluang investasi kepada pelaku usaha pariwisata Indonesia. Anggia menjelaskan bahwa Peru memiliki warisan budaya yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan sentuhan inovasi dari investor Indonesia.

Meski terbuka terhadap peluang kerja sama, ia menegaskan bahwa setiap langkah memperkuat hubungan antarnegara harus mempertimbangkan dampaknya terhadap situasi dalam negeri. Anggia mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap hasil pertanian dan produk pangan lokal agar tidak tergeser oleh produk impor.

ums/aha



Kemudahan Permodalan dan Perizinan IKM



FOTO: YSM/PDT

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Bandar Lampung.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo, menekankan pentingnya sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai potensi besar yang perlu mendapatkan perhatian serius. Ia menggarisbawahi bahwa Lampung, sebagai salah satu hub utama di wilayah Sumatera yang menjadi pintu gerbang distribusi ke Jawa dan daerah lainnya, memiliki peran strategis dalam pengembangan IKM.

“Di Lampung, permasalahan IKM sangat relevan. Ada sekitar 77 ribu industri kecil dan menengah di sini, yang tentunya memiliki potensi besar

karena Lampung adalah hub yang menghubungkan Sumatera dengan Jawa,” ujar Bambang usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Bandar Lampung, Senin (21/11).

Dalam kunjungannya, Bambang mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku IKM di Lampung, salah satunya adalah permodalan. Masalah ini sering menjadi kendala utama yang menghambat pertumbuhan IKM. Selain itu, ia menyoroti proses perizinan yang dianggap rumit dan membingungkan bagi banyak pelaku IKM.

“Permasalahan utama yang

dihadapi adalah permodalan dan perizinan yang berbelit-belit. Banyak pelaku IKM yang *gaptek*, sehingga kesulitan memahami dan mengurus izin. Oleh karena itu, pendampingan dalam proses perizinan sangat dibutuhkan,” jelas Bambang.

Ia juga mencatat kelemahan dalam pengemasan produk, yang memengaruhi daya saing dan masa simpan produk di pasar. “Pengemasan sangat penting karena berhubungan langsung dengan masa kadaluarsa produk. Tanpa pengemasan yang baik, produk IKM sulit bertahan lama di pasar dan bersaing,” tambahnya.

— ysm/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





FOTO: QQ/PDT

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, bersama tim saat Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR ke pabrik PT Mondelez International di kawasan industri Jababeka VII, Kabupaten Bekasi, Jabar.

Apresiasi Ekspor Oreo ke Pasar Dunia

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi PT Mondelez International, produsen salah satu merek biskuit terkenal di dunia, Oreo, yang memiliki pabrik di Indonesia dan mampu mengekspor biskuit produksinya ke 39 negara di pasar dunia.

“Nah, kita tahu bahwa *track record* PT Mondelez ini sangat bagus, karena mereka tidak hanya memproduksi biskuit yang dipasarkan secara nasional, tetapi juga sudah mendunia,”

ungkap Saleh usai memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR ke pabrik PT Mondelez International di kawasan industri Jababeka VII, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/11).

Selain prestasi ekspor, Komisi VII juga menyoroti keberhasilan perusahaan dalam menjaga, bahkan terus meningkatkan produksinya, di tengah kondisi pandemi covid-19 yang lalu.

“Tadi dalam diskusi dan evaluasi kinerja mereka, kami mengetahui bahwa perusahaan ini tetap on

track. Bahkan di tengah guncangan pandemi covid-19, mereka justru berhasil membangun pabrik baru, menambah kapasitas, dan seterusnya,” tambahnya.

Saleh juga mengungkapkan harapannya terhadap industri produk makanan ringan lainnya di Indonesia. Ia menekankan pentingnya keberhasilan PT Mondelez International sebagai contoh bagi perusahaan lain untuk dapat menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia.

Legislator dari Fraksi PAN itu juga mengingatkan tantangan yang akan dihadapi Indonesia terkait bonus demografi. Menurutnya, bonus demografi tersebut jangan sampai hanya dimanfaatkan sebagai pasar konsumsi, tetapi juga sebagai tenaga kerja dalam industri yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. **rr/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kemandirian Pesantren, Perkuat Ekonomi dan Pendidikan

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menekankan pentingnya penguatan ekonomi pesantren sebagai salah satu implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Menurutnya, pesantren memiliki sejarah panjang sebagai pusat pendidikan dan kekuatan ekonomi yang mandiri jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Dahulu, pesantren mandiri, bahkan mampu mengimbangi kekuatan ekonomi kelompok Arab dan Cina. Namun, dengan status pesantren sebagai pendidikan nonformal saat ini, kemampuan ekonominya menjadi tertinggal,” ujar Marwan Dasopang dalam kunjungan spesifik ke Pondok Pesantren Assiddiqiyah, Tangerang, Banten, Rabu (20/11).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Marwan mendorong adanya

kerja sama lintas sektor dengan pemerintah, swasta, dan lembaga perbankan. “Kami mendorong pesantren untuk berbenah, mengidentifikasi potensinya, dan bekerja sama dengan mitra, seperti melalui program pinjaman UMKM yang dapat disalurkan perbankan kepada pesantren,” jelasnya.

Dalam kunjungan itu, Marwan juga memberikan dukungan berupa akses permodalan dan pengembangan, seperti pembentukan inkubator bisnis untuk mendorong kemandirian pesantren. Selain itu, ia menyoroti perlunya pembentukan Direktorat Jenderal (Dirjen) khusus pesantren di Kementerian Agama.

Menurut Marwan, Dirjen Pesantren akan menjadi pengelola utama dalam fungsi pendidikan, pemberdayaan, dan dakwah pesantren secara lebih terintegrasi. “Kami di Komisi VIII telah lama merekomendasikan pembentukan Dirjen ini, dan akan terus mengawal agar realisasinya segera terwujud,” tambahnya. **— aar/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin kunjungan spesifik ke Pondok Pesantren Assiddiqiyah, Tangerang, Banten.

Pemkot Bogor Diminta Siaga Hadapi Bencana



FOTO: ICA/PDT

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Bogor, Rabu (20/11/2024).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa Kota Bogor sebagai wilayah penyangga membutuhkan kesiapsiagaan maksimal dalam menghadapi bencana, terutama di musim penghujan seperti saat ini. Ia menyoroti pentingnya langkah-langkah proaktif dari Pemerintah Kota Bogor dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menghadapi potensi bencana.

“Penanggulangan bencana tidak seharusnya hanya berfokus pada

respons darurat, tetapi juga pada upaya mitigasi dan pencegahan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, terutama mencegah adanya korban jiwa,” ujar Abidin saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Bogor, Rabu (20/11).

Ia menambahkan bahwa pemetaan wilayah rawan bencana serta strategi penanggulangan menjadi aspek penting yang harus menjadi perhatian. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengingatkan agar Pemerintah Kota Bogor bersama BNPB dan BPBD siap menjadi pusat kendali penanganan bencana, terutama terkait banjir, longsor, dan pohon tumbang yang sering terjadi di wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Cianjur.

“Komisi VIII DPR RI datang ke Kota Bogor bersama BNPB untuk memastikan kesiapan Kota Bogor, sebagai bagian dari Bogor Raya, dalam menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana,” tegas Abidin.

Abidin juga meminta BNPB dan BPBD untuk bersiaga 24 jam penuh dengan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas, guna mengantisipasi dampak bencana di wilayah Bogor Raya, termasuk Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Cianjur, dan kawasan pegunungan sekitarnya.

— ica/aha



KOMISI VIII DPR RI DATANG KE KOTA BOGOR BERSAMA BNPB UNTUK MEMASTIKAN KESIAPAN KOTA BOGOR, SEBAGAI BAGIAN DARI BOGOR RAYA, DALAM MENGHADAPI CUACA EKSTREM

Abidin Fikri

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya



Layanan RS Kemenkes Makassar Cukup Paripurna



FOTO: QQ/PDT

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, beserta tim saat meninjau pelayanan kesehatan di RS Kementerian Kesehatan Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (14/11/2024).

Anggota Komisi IV Komisi IX DPR RI menilai pelayanan kesehatan rumah sakit vertikal di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sudah cukup paripurna. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IX DPR RI ke RS Kementerian Kesehatan Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (14/11).

“Dari apa yang kami dapati di dalam selama kunjungan hari ini ya secara fisik, bangunan, kesiapannya sudah cukup paripurna, ya walaupun memang diakui ada beberapa alat

yang masih perlu dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk bisa dilengkapi agar bisa meningkatkan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, baik di Sulawesi Selatan, maupun masyarakat Indonesia bagian timur secara luas,” kata Putih kepada **Parlementaria**.

Putih menjelaskan fasilitas kesehatan RS Kementerian Kesehatan Makassar, seperti ruang kamar dan alat kesehatan nya pun sudah sangat nyaman dan modern. Tak terkecuali juga tenaga kesehatan, khususnya dokter yang mempunyai kemampuan atau skill tidak kalah dengan tenaga kesehatan dari luar negeri.

Selain fasilitas kesehatan RS Kementerian Kesehatan Makassar

yang cukup paripurna, kata Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, jaringan kerja sama antar-rumah sakit lainnya yang berada di Sulawesi Selatan sudah terjalin dengan baik dan saling melengkapi.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII itu juga menekankan betapa pentingnya pemerataan pelayanan kesehatan rujukan di setiap daerah. Setidaknya pelayanan untuk tindakan dasar pada lima penyakit prioritas, yakni jantung, kanker, stroke, uro nefrologi, serta kesehatan ibu dan anak, bisa dilakukan di rumah sakit madya di tingkat kabupaten/kota serta rumah sakit tingkat utama di provinsi.

qq/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Serap Aspirasi RSUP Kandou Sulawesi Utara



FOTO: ENO/PDT

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, saat meninjau fasilitas serta pelayanan RSUP Prof. R.D. Kandou di Sulawesi Utara.

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, memimpin Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI ke RSUP Prof. R.D. Kandou, Sulawesi Utara, untuk meninjau fasilitas rumah sakit sekaligus menyerap aspirasi dari mitra terkait.

“Komisi IX DPR RI ingin memperoleh gambaran lebih rinci terkait tantangan yang dihadapi rumah sakit vertikal dalam memberikan layanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat,” ujar Felly dalam sambutannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di RSUP Prof. R.D. Kandou, Jumat (15/11).

Felly menjelaskan bahwa

kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung kondisi serta pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit daerah. Hal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

“Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit di Indonesia, termasuk RSUP Kandou Manado, memiliki tujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan spesialis dan subspecialis,” ungkap Felly.

Dalam transformasi sistem kesehatan, Felly menegaskan bahwa rumah sakit vertikal memiliki peran strategis,

terutama dalam layanan rujukan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, serta pengembangan digitalisasi dan bioteknologi. Rumah sakit vertikal diharapkan mampu menjadi pusat layanan unggulan di Asia, jaringan pengampuan layanan prioritas, pusat pendidikan dan penelitian klinis, pengembangan kapasitas dokter spesialis, serta inovasi teknologi kesehatan.

“Selain itu, rumah sakit vertikal juga didorong untuk mendukung pemerataan layanan prioritas bagi penyakit seperti kanker, jantung, stroke, uro-nefrologi, serta kesehatan ibu dan anak. Targetnya adalah layanan ini dapat menjangkau 100% kabupaten/kota pada tahun 2027,” tambah Felly. **eno/aha**



Tinjau Implementasi Merdeka Belajar di Bandung

Komisi X DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke SMP Negeri 2 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (20/11).

Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar yang telah diterapkan di sekolah-sekolah di daerah selama lima tahun terakhir.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menjelaskan bahwa kunjungan ini memberikan

kesempatan untuk mendengar dan berdialog langsung dengan para pemangku kepentingan pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah, komite sekolah, orang tua, hingga siswa.

“Saat ini adalah masa transisi yang sangat penting. Selama lima tahun terakhir, banyak transformasi telah diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, termasuk di tingkat SMP. Kami ingin melihat dan mendengar langsung inovasi yang sudah dilakukan, serta berdialog dengan

para stakeholder. Dari kunjungan ini, kami menemukan banyak hal positif dari kebijakan Merdeka Belajar yang telah diterapkan,” ujar Hetifah.

Hetifah menyampaikan bahwa transformasi pendidikan yang dilakukan pemerintah berupaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan peserta didik. Tujuannya adalah menciptakan pendidikan berkualitas dan menjadikan siswa sebagai agen perubahan.

Namun, Hetifah juga menyoroti sejumlah masukan penting, termasuk terkait kurikulum, sistem penerimaan siswa baru (PPDB), dan asesmen nasional. “Kami berharap inovasi yang diterapkan di sekolah seperti SMP Negeri 2 Bandung dapat menjadi contoh bagi sekolah lain di seluruh Indonesia,” tambahnya.

— qq/aha



Foto: qq/pdi

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, saat memimpin kunjungan lapangan ke SMP Negeri 2 Kota Bandung.

Evaluasi Kurikulum Merdeka di Yogyakarta



FOTO: MRI/PDT

Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 11 di Yogyakarta.

Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, mengikuti kunjungan kerja spesifik ke Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 11. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi objektif pendidikan di kedua sekolah tersebut sekaligus mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka Belajar.

“Saya melihat wajah mereka bersinar dan penuh harapan. Mayoritas bercita-cita menjadi dokter, profesor, atau pengusaha sukses. Kita harus memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikan di SMA atau SMK unggulan untuk menjamin kualitas pendidikan yang berkesinambungan,” ujarnya di



sela-sela kunjungan kerja pada Rabu, (20/11).

Legislator Dapil Jawa Tengah IV ini juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) unggul demi mewujudkan visi Indonesia Emas. “Kita harus bergerak cepat untuk mewujudkan Indonesia Emas, dan saya menaruh harapan besar kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran untuk mendukung program ini,” tegasnya.

Terkait evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar, Juliyatmono mengapresiasi kelebihan kurikulum tersebut namun mengakui masih adanya tantangan dalam pelaksanaannya. Ia menyoroti pentingnya kualitas pengajaran dan lingkungan belajar yang mendukung.

Kunjungan ini juga mencakup observasi terhadap perbandingan kedua sekolah guna memahami kendala yang dihadapi dalam implementasi kurikulum. Juliyatmono berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi bahan diskusi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mengatasi permasalahan pendidikan.

 mri/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Jawa Tengah



FOTO: FHN/PDT

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI bersama OJK, HIMBARA, dan PERBARINDO di Semarang.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menilai adanya celah antara literasi keuangan dan inklusi keuangan di masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, ia melakukan pengawasan terhadap OJK, HIMBARA, dan PERBARINDO dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di provinsi tersebut.

“Kita melihat bahwa di Jawa Tengah ini terjadi *gap* antara literasi keuangan dan inklusi keuangannya. Literasi keuangannya relatif rendah dibandingkan inklusinya, yang berarti

ada persoalan di sana yang memang harus digencarkan ke depannya untuk memperkecil *gap* tersebut,” ujar Hanif saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI bersama

OJK, HIMBARA, dan PERBARINDO di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (21/11).

Lebih lanjut, legislator dari Dapil Jawa Tengah X ini juga menyoroti maraknya kasus judi dan pinjaman *online* yang sangat merugikan masyarakat. Ia pun meminta OJK untuk mengupayakan langkah tegas dalam menghadapi hal tersebut.

“Dari penjelasan OJK yang sudah kita dengar, mereka telah melakukan sejumlah upaya untuk memastikan agar *platform* judi *online* maupun pinjaman *online* bisa terus berkurang, salah satunya dengan cara menutup rekening para pengguna judi *online* dan juga membuat tim anti-scam untuk memastikan berbagai model penipuan yang dilakukan oleh sejumlah pihak dapat diantisipasi untuk menyelamatkan dana masyarakat,” lanjut politisi Fraksi PKB ini.

Hanif juga mengapresiasi kinerja OJK dalam mengatasi kasus judi dan pinjaman *online* dan berharap agar Komisi XI terus mendorong langkah-langkah dan upaya OJK sebagai otoritas yang mengawasi dan menjadi benteng dalam mengentaskan kasus tersebut.

mf/aha



PENJELASAN OJK YANG SUDAH KITA DENGAR, MEREKA TELAH MELAKUKAN SEJUMLAH UPAYA UNTUK MEMASTIKAN AGAR PLATFORM JUDI ONLINE MAUPUN PINJAMAN ONLINE BISA TERUS BERKURANG

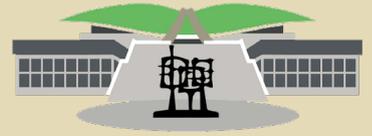
Hanif Dhakiri

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya





**Ketua Komisi X DPR RI,
Hetifah Sjaifudian, saat
memimpin kunjungan
lapangan ke SMP Negeri
2 Kota Bandung.
FOTO:QQ/PDT**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

